

ANALISIS PROGRAM INDONESIA PINTAR DALAM MENGURANGI PUTUS SEKOLAH DI KABUPATEN BANDUNG

Randi Purnama^{1(a)}, Izzatusholekha^{2(b)}

^{1,2}Magister Ilmu Administrasi, Universitas Muhammadiyah Jakarta

^{a)}22010500001@student.umj.ac.id, ^{b)}izzatusholekha@umj.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

26-01-2023

Diterbitkan Online:

01-03-2023

Kata Kunci:

Analisis, Program Indonesia Pintar (PIP), Angka Putus Sekolah

Keywords:

Analysis, Smart Indonesia Program (PIP), School Dropout Rate

Corresponding Author:

purnamarandi21@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini untuk melakukan Analisis Program Indonesia Pintar (PIP) Dalam Mengurangi Putus Sekolah Di Kabupaten Bandung. Menggunakan analisis data sekunder melalui pengamatan dan studi literatur dengan fokus penelitian ini diarahkan mengenai analisis kriteria program yaitu ; Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan dari segi efektivitas sudah efektif dalam menurunkan angka putus sekolah. Dari segi efisiensi belum efisien masih ada siswa yang seharusnya menerima PIP belum tersentuh program. Dari segi kecukupan sudah efektif dalam mengurangi angka putus sekolah. Dari segi pemerataan distribusi program belum merata dilakukan. Dari segi responsivitas belum optimal kurangnya sosialisasi dan informasi yang didapatkan oleh masyarakat dan lembaga pendidikan. Dari segi ketepatan belum tepat dalam pendistribusian dan kesulitan pengawasan penggunaan dana program.

ABSTRACT

This research is to conduct an analysis of the Smart Indonesia Program (PIP) in reducing school dropouts in Bandung Regency. Using secondary data analysis through observations and literature studies with the focus of this research directed at analyzing program criteria, namely; Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Equity, Responsiveness, and Accuracy. The results showed that in terms of effectiveness it was effective in reducing the dropout rate. In terms of efficiency, there are still students who should receive PIP that have not been touched by the program. In terms of adequacy, it is effective in reducing the dropout rate. In terms of equitable distribution, the program has not been evenly distributed. In terms of responsiveness, the lack of socialization and information obtained by the community and educational institutions is not optimal. In terms of accuracy, the distribution and supervision of the use of program funds have not been precise.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jmiap.v5i1.600>

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembentukan sumber daya manusia, untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas, negara harus mempersiapkan mulai dari tingkat yang paling rendah yaitu anak usia sekolah, memastikan bahwa setiap anak bangsa mempunyai kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan. Negara menjamin seluruh anak bangsa mendapatkan pendidikan yang bermutu, termasuk bagi siswa dari keluarga ekonomi lemah berhak menerima beasiswa sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pendidikan adalah investasi peradaban untuk memastikan generasi penerus bangsa memiliki kecerdasan dan keterampilan sehingga dapat menopang pembangunan negara di masa depan. Strategi pemerintah untuk menjamin setiap anak untuk mendapatkan akses pendidikan dan memberikan perhatian khusus berupa bantuan biaya pendidikan dengan mengeluarkan Program Indonesia Pintar (PIP). Yang bertujuan meningkatkan partisipasi sekolah anak berusia (6 -21 tahun) untuk mendapatkan pendidikan sampai tamat wajib belajar 12 tahun dan mencegah kemungkinan siswa putus sekolah (*drop out*) akibat kesulitan biaya pendidikan dengan cara menghilangkan hambatan biaya (*cost barrier*) agar siswa dapat terus bersekolah sampai jenjang pendidikan yang lebih tinggi (Dahlia & Jamaludin, 2019).

Menurut penelitian (Agusman, 2019) rendahnya partisipasi pendidikan di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor : (1) siswa memiliki kesulitan dalam menjangkau fasilitas pendidikan, (2) keterbatasan biaya, dan (3) tingginya putus sekolah disebabkan dana keluarga diprioritaskan mencukupi kebutuhan konsumtif terlebih dahulu.

Kemiskinan merupakan salahsatu faktor penyumbang tidak meratanya pendidikan di Indonesia. Permasalahan ekonomi keluarga menjadi faktor yang mempengaruhi rendahnya angka partisipasi pendidikan (Nurokhmah, 2021) terutama secara khusus di Kabupaten Bandung. Kemiskinan dan pendidikan memiliki kaitan yang sangat erat dengan mahalnya biaya pendidikan mengakibatkan masyarakat dari keluarga ekonomi tidak mampu kesulitan untuk mengakses pendidikan (Rohaeni & Saryono, 2018). Pada tahun 2021 Kabupaten Bandung masuk ke dalam kategori 5 kabupaten kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Barat

(Detik.com, 2021). Rata-rata lama sekolah masyarakat Kabupaten Bandung tahun 2022 hanya 9,08 tahun atau hanya lulusan SMP sederajat, masih jauh dari target wajib belajar 12 tahun. Data tersebut juga didukung dengan sangat signifikannya jumlah peserta didik lulusan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Bandung pada tahun 2020 sebanyak 17.160 siswa (BPS, 2022).

Sebagai upaya meningkatkan partisipasi sekolah pada jenjang SMA Gubernur Jawa Barat membuat kebijakan menggratiskan biaya masuk dan membebaskan iuran bulanan peserta didik (IBPD) mulai tahun ajaran 2020-2021 serta memberikan bantuan kepada siswa SMA sebesar Rp. 145.000,- per orang pertahun dan untuk siswa SMK Rp. 150.000,- per orang pertahun sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 165 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Biaya Operasional Pendidikan (BOP).

Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dalam upaya mengurangi siswa putus sekolah dan meningkatkan partisipasi siswa untuk tetap bersekolah telah mengalokasikan anggaran dengan tidak memungut biaya pendidikan bagi siswa dari keluarga miskin melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung.

Faktor usia pernikahan dini atau pernikahan anak usia sekolah di Kabupaten Bandung juga menjadi salahsatu faktor yang memberikan sumbangsih tingginya siswa putus sekolah. Pada tahun 2021 anak usia 16-18 tahun atau jenjang (SMP dan SMA) jika di rata-ratakan setiap hari terdapat 2,5 - 3 anak putus sekolah karena menikah pada usia dini (Ayobandung.com, 2021). Pada tahun 2019 sampai tahun 2021 tingginya angka pernikahan anak usia sekolah merupakan effect dari diberlakukannya proses KBM online akibat Pandemi Covid-19.

Tabel 1. Jumlah Pernikahan Anak Usia Sekolah

Tahun	Jumlah Pernikahan Anak Usia Sekolah
2019	433 anak
2020	669 anak
2021	679 anak

Sumber: Detik.com, 2021

Faktor Infrastruktur atau kekurangan sekolah pada jenjang SMP dan SMA juga turut berkontribusi dalam banyaknya siswa sekolah dasar tidak melanjutkan ke pendidikan menengah, Bupati Bandung menyatakan jika Kabupaten Bandung masih kekurangan sekolah pada jenjang sekolah menengah. yang keberadaannya belum merata di 31 Kecamatan. (Inisumedang.com, 2022). Dengan jumlah sebaran sekolah yang tidak merata mengakibatkan biaya transportasi juga menjadi tambahan beban biaya bagi siswa dari keluarga ekonomi tidak mampu. Merespon permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Bandung akan membangun 28 unit SMP dan SMA yang merata disetiap Kecamatan. (Kompas.com, 2022).

Penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) di Kabupaten Bandung masih terdapat beberapa kendala, banyak masyarakat dan lembaga pendidikan yang belum mengetahui adanya Program Indonesia Pintar (PIP) dan tidak tahu cara mengajukan atau mengusulkan menjadi penerima program tersebut, sehingga diperlukan sosialisasi intensif dan efektif terkait Program Indonesia Pintar (PIP) agar masyarakat Kabupaten Bandung memahami tujuan dan manfaat serta tata cara pengusulannya.

Penyaluran dana PIP juga sering terjadi keterlambatan, pihak sekolah juga tidak segera menginformasikan kepada penerima dengan cepat. Bantuan biaya yang diterima juga tidak cukup memenuhi seluruh kebutuhan pendidikan siswa, masih ada biaya penunjang sekolah yang harus dikeluarkan oleh orangtua. Dalam hal pengasawan penggunaan dana pihak sekolah tidak dapat melaukan pengawasan secara langsung yang semestinya dipergunakan untuk keperluan sekolah namun masih ada yang dipergunakan untuk kebutuhan konsumtif (Sholikhah, 2018).

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan bantuan tunai dari pemerintah diperuntukan bagi siswa dari keluarga ekonomi lemah untuk meringankan biaya sekolah melalui pembagian Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar. (Dimmera & Purnasari, 2020).

Setiap lembaga pendidikan dan pelatihan serta pemangku kepentingan dapat mengusulkan Program Indonesia Pintar (PIP) sesuai kriteria:

- a) Siswa Pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP);
- b) Siswa dari keluarga penerima program PKH;
- c) Siswa dari keluarga penerima program Keluarga Sejahtera;
- d) Siswa yatim piatu, berada di panti sosial, berada di panti asuhan;
- e) Siswa yang terdampak bencana alam;
- f) Siswa (*drop out*);
- g) Siswa dengan kelainan fisik, orang tua yang mengalami PHK, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di lembaga permasyarakatan, memiliki lebih dari tiga (3) saudara yang tinggal serumah;
- h) Peserta lembaga kursus atau pendidikan nonformal.

Besaran dana PIP sebagai mana tertuang pada Peraturan Sekretaris Kemendikbud Nomor 20 tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan PIP sebagai berikut :

Tabel 2. Besaran Dana PIP Per-Siswa Per-Tahun

Jenjang	Besaran Dana / Siswa / Tahun
SD sederajat	1. Rp. 225.000 Kelas VI.
	2. Rp. 450.000 Kelas I s.d Kelas V.
SMP sederajat	1. Rp. 375.000 Kelas IX.
	2. Rp. 750.000 Kelas VII dan VIII.
SMA sederajat	1. Rp. 500.000 Kelas XII.
	2. Rp. 1.000.000 Kelas X dan XI.

Sumber : Kemendikbud (2022)

Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) disalurkan kepada siswa satu tahun sekali untuk menunjang biaya pendidikannya. Mekanisme penyaluran dan pengambilan dana PIP melalui lembaga penyalur atau bank yang ditunjuk oleh pemerintah dimana setiap siswa dapat mengambil secara langsung dengan membawa dokumen surat keputusan penerima PIP, virtual account dan nomor rekening serta permohonan pencairan dana PIP dari lembaga pendidikan tempat siswa bersekolah (Yosevina et al, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi dan fakta (Sanusi, 2011). Fokus penelitian kepada evaluasi Program

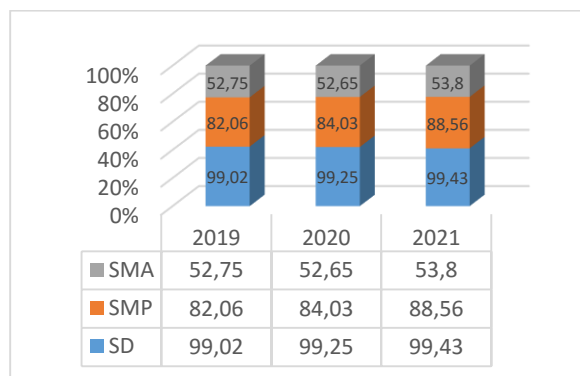
Indonesia Pintar (PIP) untuk mengetahui keefektifan, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsifitas dan ketepatan dalam mengurangi angka putus sekolah di Kabupaten Bandung. Dengan Teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur dari Kemendikbud, BPS, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, dokumen kebijakan dan publikasi lain yang berkaitan dengan Program Indonesia Pintar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indikator utama kualitas sumber daya manusia suatu negara adalah mutu dan kualitas pendidikan. Sumber daya manusia yang unggul juga dapat menunjang keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Pendidikan merupakan solusi untuk memutus mata rantai kemiskinan dan hidup dengan layak sesuai yang diharapkan. Untuk mencapai mutu dan pemerataan pendidikan maka negara menjamin kesempatan untuk mengakses pendidikan begitupun bagi siswa miskin dengan diberikannya beasiswa (Yosevina et al, 2022).

Program Indonesia Pintar (PIP) berdampak positif terhadap motivasi siswa dalam menyelesaikan pendidikan sehingga menurunkan putus sekolah dan berdampak meningkatkan partisipasi sekolah (Sari & Ahmad, 2022). Selama Pandemi Covid-19 PIP efektif mengurangi beban biaya bagi siswa terutama yang berasal dari keluarga miskin (Karningsih, 2021).

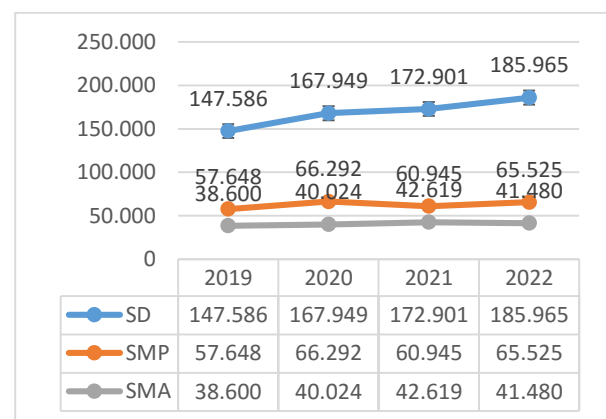
Gambaran Umum Angka Partisipasi Murni Siswa SD, SMP, SMA di Kabupaten Bandung Tahun 2019-2022



Gambar 1. Angka Partisipasi Murni Siswa SD, SMP, SMA 2019-2021 di Kabupaten Bandung

Sumber : BPS Kabupaten Bandung, Data diolah

Berdasarkan Gambar 1, diketahui bahwa angka partisipasi murni sekolah atau keberlanjutan sekolah dari jenjang pendidikan SD ke Jenjang pendidikan SMP dan SMA di Kabupaten Bandung dari periode tahun 2019 - 2022 terus mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa banyak siswa di Kabupaten Bandung yang terhenti pendidikannya pada jenjang SD saja dan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan berikutnya. Banyak faktor yang mempengaruhi siswa di Kabupaten Bandung tidak melanjutkan sekolah seperti faktor ekonomi, pernikahan usia dini dan ketersediaan infrastruktur sekolah SMP dan SMA yang belum merata di semua kecamatan.



Gambar 2. Jumlah Siswa Penerima PIP Kabupaten Bandung Tahun 2018-2022

Sumber: Kemdikbud, 2022 Data diolah

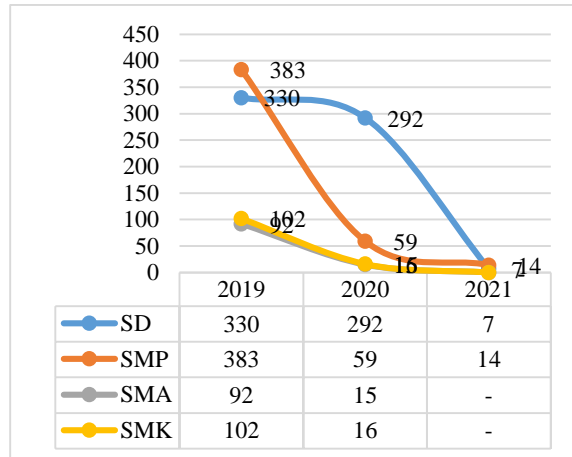
Penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) selama periode tahun 2019-2022 di Kabupaten Bandung telah telah disalurkan sebanyak 1.085.534 siswa pada jenjang pendidikan seperti data pada Gambar 2. Namun jumlah penyaluran PIP untuk jenjang SMP dan SMA di Kabupaten Bandung jumlahnya masih sangat sedikit hanya 50% dari jumlah PIP jenjang SD.

Penelitian tentang Analisis Program Indonesia Pintar (PIP) Dalam Mengurangi Putus Sekolah Di Kabupaten Bandung, penulis menggunakan teori (Dunn, 2013) dengan memperhatikan 6 kriteria ; Efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, dan Ketepatan.

Efektifitas

Efektivitas PIP di Kabupaten Bandung dalam segi jumlah menurunkan siswa putus sekolah sudah sangat efektif. Sesuai dengan data pada Gambar 3 jumlah siswa putus sekolah dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 terus menurun. Bahkan pada tahun 2021 hanya

terdapat 7 siswa SD yang *drop out*, pada jenjang SMP terdapat 14 siswa dan tidak ada siswa putus sekolah pada jenjang sekolah SMA. Dengan demikian penyaluran PIP di Kabupaten Bandung sudah sangat efektif dalam menurunkan angka putus sekolah.



Gambar 3. Data Siswa Putus Sekolah di Kabupaten Bandung Tahun 2019-2022

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, 2022 Data diolah

Namun efektivitas PIP untuk meningkatkan partisipasi sekolah pada jenjang SMP dan SMA di Kabupaten Bandung belum efektif. Data pada Gambar 1, menunjukkan walaupun dari tahun 2019 sampai tahun 2021 terjadi kenaikan angka partisipasi sekolah namun kenaikannya belum signifikan, masih banyak siswa yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah.

Efisiensi

Implementasi PIP belum efisien. Belum sepenuhnya siswa dari keluarga ekonomi tidak mampu yang belum tersentuh oleh PIP dan kurangnya informasi kepada masyarakat maupun lembaga pendidikan tentang tata cara pengusulan dan pencairan PIP. Walaupun para pemangku kepentingan sudah melakukan upaya dengan menyalurkan Program Indonesia Pintar (PIP) selama periode tahun 2019-2022 di Kabupaten Bandung telah disalurkan sebanyak 1.085.534 siswa dari semua tingkatan pendidikan seperti data pada Gambar 2 diatas.

Kedepannya para pemangku kepentingan di Kabupaten Bandung harus berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia agar kuota untuk jenjang SMP dan SMA dapat ditambah agar meningkatkan angka partisipasi sekolah untuk jenjang SMP dan SMA. Juga harus melakukan sinergitas dengan Pemerintah

Provinsi Jawa Barat karena pengelolaan SMA berada pada tanggungjawab Pemerintah Provinsi.

Kecukupan

Dari segi kecukupan program apabila dikaitkan dengan terhadap angka putus sekolah maka program ini telah cukup untuk mengurangi siswa putus sekolah. Namun belum optimal dalam meningkatkan partisipasi sekolah siswa terutama pada tingkat SMP dan SMA.

Kemudian dalam hal jumlah dana PIP bantuan biaya yang diterima juga tidak cukup memenuhi seluruh kebutuhan pendidikan siswa, masih ada biaya penunjang sekolah yang harus dikeluarkan oleh orangtua seperti biaya transportasi, uang saku dan biaya buku.

Perataan

Pemerataan distribusi PIP di Kabupaten Bandung belum merata dilakukan. Terutama untuk distribusi PIP pada jenjang SMP dan SMA jumlahnya masih sangat sedikit, pada tahun 2022 jumlah siswa SMP di Kabupaten Bandung berjumlah 134.115 siswa dan PIP yang disalurkan sebanyak 65.525 atau hanya 48,85 % saja. Dan untuk jenjang SMA hanya disalurkan PIP sebanyak 36 % atau sebanyak 41.480 dari jumlah siswa SMA yang berjumlah 115.167 siswa.

Kemudian distribusi PIP pada jenjang SMA sangat terlihat belum merata di semua Kecamatan di Kabupaten Bandung padahal di daerah tersebut terdapat sekolah SMA sederajat. Berikut data sebaran distribusi PIP pada tahun 2022 yang jumlahnya sangat sedikit di 5 Kecamatan dibandingkan dengan beberapa kecamatan yang lain.

Tabel 3. Jumlah distribusi PIP SMA sederajat berdasarkan sebaran terkecil

No	Kecamatan	Jumlah PIP
1.	Cangkuang	SMK 15 Siswa
2.	Cimendan	SMA 84 Siswa SMK 105 Siswa
3.	Kertasari	Jenjang SMA tidak ada penerima PIP
4.	Kutawaringin	SMA 150 Siswa SMK 60 Siswa
5.	Pasirjambu	SMA 88 Siswa

Sumber: Kemendikbud, 2022 Data diolah

Responsivitas

Dari segi responsivitas PIP di Kabupaten Bandung masih kurang optimal masih banyaknya lembaga pendidikan khususnya operator dapodik tidak mengetahui adanya program PIP. Dan sering terjadinya keterlambatan informasi yang diberikan oleh lembaga pendidikan kepada para penerima PIP sehingga banyak akun PIP yang terlambat atau bahkan belum dilakukan aktivasi di bank penyalur.

Tidak adanya koordinasi antara pemerintah daerah dengan para pemangku kepentingan yang memiliki kuota PIP untuk diatur distribusi penyalurannya, sehingga terlihat tidak adanya pemerataan dikarenakan hanya lembaga pendidikan atau masyarakat yang memiliki akses saja yang dapat mengusulkan PIP.

Ketepatan

Berdasarkan hasil pengamatan pelaksanaan PIP di Kabupaten Bandung dari segi ketepatan belum berjalan sesuai dengan manfaat yang diharapkan, karena masih banyak siswa dari keluarga ekonomi tidak mampu belum mendapatkan bantuan PIP. Hal ini dapat terlihat kurangnya angka keberlanjutan partisipasi sekolah dari jenjang SD ke jenjang pendidikan SMP dan SMA di Kabupaten Bandung.

Kemudian dalam hal penggunaan dana bantuan PIP pihak sekolah atau lembaga pendidikan tidak dapat melakukan pengasan secara langsung apakah dana yang diterima dipergunakan untuk kebutuhan penunjang sekolah atau dipergunakan untuk kebutuhan konsumtif.

PENUTUP

Analisis Program Indonesia Pintar (PIP) Dalam Mengurangi Putus Sekolah Di Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut: (a) Dari segi efektivitas maka dapat dikatakan sudah efektif karena angka putus sekolah di Kabupaten Bandung dari tahun 2019-2021 terus menurun. Tetapi belum efektif dalam meningkatkan angka partisipasi keberlanjutan sekolah dari setiap jenjang pendidikan. (b) Dari segi efisiensi masih kurang efisien karena masih banyak siswa dari keluarga ekonomi tidak mampu yang belum tersentuh oleh PIP dan kurangnya informasi kepada masyarakat maupun lembaga pendidikan tentang tata cara pengusulan dan pencairan PIP. (c) Dari segi kecukupan jika dikaitkan dengan jumlah anak putus sekolah maka PIP sudah cukup untuk

mengurangi siswa putus sekolah. Namun belum optimal dalam meningkatkan partisipasi sekolah terutama untuk tingkat SMP dan SMA. (d) Dari segi pemerataan, distribusi PIP di Kabupaten Bandung belum merata dilakukan. Terutama untuk distribusi PIP pada jenjang SMP dan SMA jumlahnya masih sangat sedikit dan distribusi pada jenjang SMA sangat terlihat belum merata pada semua Kecamatan di Kabupaten Bandung. (e) Dari segi responsivitas PIP di Kabupaten Bandung masih kurang optimal masih banyaknya lembaga pendidikan khususnya operator dapodik tidak mengetahui adanya program PIP. Dan sering terjadinya keterlambatan informasi yang diberikan oleh lembaga pendidikan kepada para penerima PIP.

Dari segi ketepatan belum berjalan sesuai dengan manfaat yang diharapkan, karena masih banyak siswa sesuai kriteria penerima belum mendapatkan bantuan PIP. Kemudian penggunaan dana bantuan PIP pihak sekolah atau lembaga pendidikan tidak dapat melakukan pengasan secara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdalah, Midan. (2021). Hampir 3 anak putus sekolah dan menikah dini di kabupaten bandung setiap hari. Ayo Bandung.com. Diakses dari <https://www.ayobandung.com>
- Agusman, Y. (2019). Implementasi Program Indonesia Pintar di Sekolah Dasar Negeri 1 Kolakaasi Kabupaten Kolaka. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 4(2), 105-113. doi:10.22225/pi.4.2.2019.105-113
- BPS Kabupaten Bandung. (2022). *Angka Partisipasi Murni (APM) 2019-2021*. Bandung: BPS Kabupaten Bandung.
- Dahlia & Jamaludin. (2019). *Jurnal Edu Civic. Media Publikasi Ilmiah Prodi PPKn*, 5(01), 21-29.
- Dimmera, B. G., & Purnasari, P. D. P. (2020). Permasalahan Dan Solusi Program Indonesia Pintar Dalam Mewujudkan Pemerataan Pendidikan Di Kabupaten Bengkulu. *Sebatik*, 24(2), 307-314. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v24i2.1137>

- Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. (2022). Gambaran Umum Data Potensi Peserta Didik Kabupaten Bandung. dapodik.disdik.jabarprov.go.id.
- Dunn, W. N. (2013). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (5th ed.). Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press.
- Edrial, Putrama, R., & Sujastiawan, A. (2022). Evaluasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Di SMA Negeri 1 Utan Tahun 2019-2020. *Jurnal Kapita Selekta Administrasi Publik*, 3(1), 109-116. Retrieved from <https://ejournalppmunsa.ac.id/index.php/ksap/article/view/905/878>
- Hadiana, Ruli. (2022). 28 Sekolah baru akan dibangun di bandung. Kompas tv. Diakses dari <https://www.kompas.tv>
- Karningsih, K. (2021). Implementasi Program Indonesia Pintar Di Era Pandemi Covid-19. *Public Service and Governance Journal*, 2(02), 41. <https://doi.org/10.56444/psgj.v2i02.2276>
- Kemdikbud. (2022, Desember 15). *Nominasi Propinsi*. Retrieved from pip.kemdikbud.go.id: <https://pip.kemdikbud.go.id/nominasi>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2015, Mei 12). *Program Indonesia Pintar*. Retrieved from [/peraturan.bpk.go.id](http://peraturan.bpk.go.id): <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/138487/permendikbud-no-12-tahun-2015>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. (2022, Desember 15). *Data Peserta Didik*. Retrieved from dapo.kemdikbud.go.id: <https://dapo.kemdikbud.go.id/pd/1/020000>
- Kharisma, Atta. (2022). Strategi kabupaten bandung untuk naikan indeks pembangunan manusia. Detik.com. Diakses dari <https://www.detik.com>
- Maulana Yudha. (2021). Kabupaten di jabar yang disorot pusat soal kemiskinan ekstrem. Detik.com. Diakses dari <https://news.detik.com>
- Nashear, Dila. (2022). Bupati sebut kabupaten bandung masih kekurangan sekolah tingkat smp dan sma. Inimahsumedang.com. Diakses dari <https://inisumedang.com>
- Nurokhmah. (2021). *Program Indonesia Pintar (PIP): Implementasi Kebijakan Kesejahteraan dalam Upaya Meningkatkan Angka Partisipasi Pendidikan*. 2(1), 37-48.
- Rohaeni, N. E., & Saryono, O. (2018). Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Upaya Pemerataan Pendidikan. *Indonesian Journal of Education Management & Administration Review*, 2(1), 193-204.
- Sanusi. (2011). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sari & Ahmad. (2020). Evaluasi Program Indonesia Pintar di Masrasah Ibtidaiyah Swasta Keamatan Blimbing Kota Malang dengan Model CIPPO. *Jurnal Evaluasi Pembelajaran*, 2(1)
- Sholikhah. (2018). Pemanfaatan Dana Program Indonesia Pintar (PIP) oleh Siswa SMPN 2 Gerangsari Kabupaten Gunungkidul. *Foundasia*, 9(1).
- Uriyalita, F., Syahrodi, J., & Sumanta. (2020). Evaluasi Program Indonesia Pintar (PIP) Telaah Tentang Aksesibilitas, Pencegahan Dan Penanggulangan Anak Putus Sekolah Di Wilayah Urban Fringe Harjamukti, Cirebon. *EDUM Journal*, 3(2), 179-199. doi:10.31943/edumjournal.v3i2.69
- Yosevina, Murwaningsih & Ninghardjanti. (2022). Epektifitas Pemanfaatan Kartu Indonesia Pintar di SMK Negeri Se Kota Surakarta. *Jurnal Informasi dan Komunikasi Administrasi Perkantoran*, 6(3).
- Yusup, W. B., Ismanto, B., & Wasitohadi. (2019). Evaluasi Program Indonesia Pintar dalam Peningkatan Akses Pendidikan di

Sekolah Menengah Pertama. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 6(1), 44-53. doi:10.24246/j.jk.2019.v6.i1.p44-53